



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Magelang mendapat Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa berupa Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan diterima setelah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului Penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 ✓
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67);
28. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ✓
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 56);
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang ✓
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 206.161.682.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 581.823.280.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 100.093.516.000,-</u>

Jumlah Pendapatan

Rp. 888.078.478.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 330.672.541.000,-
2) Belanja Bunga	Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,-
4) Belanja Hibah	Rp. 5.814.694.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 572.100.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 560.703.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 12.099.841.000,-</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 349.719.879.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 52.394.052.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 300.795.565.000,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 214.801.325.000,-</u>

Jumlah Belanja Langsung Rp. 567.990.942.000,-

Jumlah Belanja Rp. 917.710.821.000,-

Surplus/(Defisit) Rp. (29.632.343.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp. 42.800.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 13.167.657.000,- (-)</u>

Pembiayaan Netto Rp. 29.632.343.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,-

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017.

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

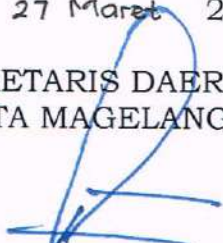
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENDAPATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4	PENDAPATAN	877.704.078.000,00	888.078.478.000,00	10.374.400.000,00	1,18		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	206.161.682.000,00	206.161.682.000,00	0,00	0,00		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.821.800.000,00	29.821.800.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.1	Pajak Hotel	3.159.000.000,00	3.159.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01	Hotel Bintang Lima	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangraha/Hostel/Rumah Kos	2.739.000.000,00	2.739.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.02.01	Restoran	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.02.02	Rumah Makan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.1.02.03	Cafe						

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6	
1	2	3	4			7
4.1.1.02.04	Kantin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.05	Katering	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.09	Jasa Boga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.05	Pameran	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.07	Karaoke	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.10	Pernmainan Billar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.15	Pernmainan Kelangkasan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.20	Rental/PS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	913.000.000,00	913.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.02	Reklame Kain	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.080.000.000,00	8.080.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	8.070.000.000,00	8.070.000.000,00	0,00	0,00	Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.07	Pajak Parkir	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.439.058.000,00	5.439.058.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.041.884.000,00	3.041.884.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	279.871.000,00	279.871.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	319.534.000,00	319.534.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengubuan Mayat	101.515.000,00	101.515.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	605.900.000,00	605.900.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	286.215.000,00	286.215.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	719.280.000,00	719.280.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	329.868.000,00	329.868.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.24	Retribusi Pelayanan Pasar - Jeep	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	39.548.500,00	39.548.500,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	0,00		
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	157.741.500,00	157.741.500,00	0,00	0,00		

Halaman 3

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	69.930.000,00	69.930.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	58.162.000,00	58.162.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.234.549.000,00	1.234.549.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	781.454.000,00	781.454.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan Klinik Kesehatan hewan	8.655.000,00	8.655.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	228.840.000,00	228.840.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.162.625.000,00	1.162.625.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.629.078.000,00	6.629.078.000,00	0,00	0,00		
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.545.636.000,00	2.545.636.000,00	0,00	0,00		
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.102.808.000,00	1.102.808.000,00	0,00	0,00		
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.407.665.000,00	1.407.665.000,00	0,00	0,00		
4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	35.163.000,00	35.163.000,00	0,00	0,00		
4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	4.083.442.000,00	4.083.442.000,00	0,00	0,00		
4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.178.456.000,00	2.178.456.000,00	0,00	0,00		
4.1.3.04.02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	1.824.376.000,00	1.824.376.000,00	0,00	0,00		

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	80.610.000,00	80.610.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakti Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.271.746.000,00	164.271.746.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	4.458.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	4.458.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	156.335.964.000,00	156.335.964.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	153.257.964.000,00	153.257.964.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	23.975.000,00	23.975.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	12.475.000,00	12.475.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	581.823.280.000,00	581.823.280.000,00	0,00	0,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.795.103.000,00	30.795.103.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	28.604.897.000,00	28.604.897.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	18.584.044.000,00	18.584.044.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.688.905.000,00	5.688.905.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
4.2.1.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	4.331.948.000,00	4.331.948.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.190.206.000,00	2.190.206.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	205.770.000,00	205.770.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000,00	54.762.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	413.252.000,00	413.252.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.203.000,00	20.203.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari SDA Minerba	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	447.909.575.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	447.909.575.000,00	0,00	0,00			
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	447.909.575.000,00	0,00	0,00			
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	103.118.602.000,00	103.118.602.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Reguler	23.696.000.000,00	23.696.000.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	1.544.000.000,00	1.544.000.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	0,00	0,00			
4.2.3.01.03	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	4.552.000.000,00	4.552.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017		
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	32.258.000.000,00	32.258.000.000,00	0,00	0,00			

Halaman 6

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.3.02.02	DAK Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)	15.400.000.000,00	15.400.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.2.3.02.05	DAK Bidang Jalan	16.858.000.000,00	16.858.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.164.602.000,00	47.164.602.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.2.3.03.02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.767.400.000,00	3.767.400.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.2.3.03.03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	38.734.543.000,00	38.734.543.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.2.3.03.04	DAK Bidang Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	837.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.2.3.03.05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.215.727.000,00	3.215.727.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.2.3.03.07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	609.932.000,00	609.932.000,00	0,00	0,00	tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dan Provinsi Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	89.719.116.000,00	100.093.516.000,00	10.374.400.000,00	11,56	
4.3.3		42.679.650.000,00	42.679.650.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01		42.679.650.000,00	42.679.650.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/003/2016 Tanggal 02 Februari 2016 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.3.3.01.01		9.400.271.000,00	9.400.271.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.03		10.201.529.000,00	10.201.529.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/003/2016 Tanggal 02 Februari 2016 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.741.040.000,00	13.741.040.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/003/2016 Tanggal 02 Februari 2016 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.436.000,00	4.436.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	9.332.374.000,00	9.332.374.000,00	0,00	0,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	0,00	0,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	10.374.400.000,00	10.374.400.000,00	0,00	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	10.374.400.000,00	10.374.400.000,00	0,00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	0,00	10.374.400.000,00	10.374.400.000,00	0,00	
5	BELANJA	907.336.421.000,00	917.710.821.000,00	10.374.400.000,00	1,14	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	347.294.986.000,00	349.719.879.000,00	2.424.893.000,00	0,70	
5.1.1	Belanja Pegawai	330.672.541.000,00	330.672.541.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	287.424.360.000,00	287.424.360.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	187.461.259.644,00	187.461.259.644,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	17.108.715.921,00	17.108.715.921,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.324.260.088,00	7.324.260.088,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.480.713.120,00	10.480.713.120,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.509.191.538,00	3.509.191.538,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	10.708.849.532,00	10.708.849.532,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	471.985.637,00	471.985.637,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.726.327,00	2.726.327,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.114.287.822,00	6.114.287.822,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	57.358.000,00	57.358.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	21.119.000,00	21.119.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	38.536.000,00	38.536.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	21.119.000,00	21.119.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.247.000,00	106.247.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	3.024.450.000,00	3.024.450.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legislasi	16.329.000,00	16.329.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	1.008.639.371,00	1.008.639.371,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	38.734.543.000,00	38.734.543.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	837.000.000,00	837.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	38.666.400.000,00	38.666.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	38.416.800.000,00	38.416.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.800.450.000,00	1.800.450.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	190.769.000,00	190.769.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.290.000,00	165.290.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	129.772.000,00	129.772.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	55.363.000,00	55.363.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	491.612.000,00	491.612.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	15.001.000,00	15.001.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	339.218.000,00	339.218.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	397.500.000,00	397.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	291.331.000,00	291.331.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	13.993.000,00	13.993.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.996.000,00	15.996.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.385.000,00	37.385.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	66.768.000,00	66.768.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	24.431.000,00	24.431.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemaknaan Kekayaan Daerah	41.664.000,00	41.664.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	6.777.000,00	6.777.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.442.000,00	11.442.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	5.814.694.000,00	5.814.694.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	5.814.694.000,00	5.814.694.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	1.154.100.000,00	1.154.100.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05.02	Sekolah	4.660.594.000,00	4.660.594.000,00	0,00	0,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	572.100.000,00	572.100.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	303.100.000,00	303.100.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	303.100.000,00	303.100.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	269.000.000,00	269.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	269.000.000,00	269.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	560.703.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	560.703.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	26.632.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	56.021.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	50.079.100,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	156.130.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	81.126.200,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	34.149.300,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	60.108.100,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	43.596.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	52.861.300,00	0,00	0,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	12.099.841.000,00	2.424.893.000,00	25,06	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	12.099.841.000,00	2.424.893.000,00	25,06	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	12.099.841.000,00	2.424.893.000,00	25,06	
5.2	BELANJA LANGSUNG	560.041.435.000,00	567.990.942.000,00	7.949.507.000,00	1,42	
5.2.1	Belanja Pegawai	52.312.577.000,00	52.394.052.000,00	81.475.000,00	0,16	
5.2.1.01	Honorarium PNS	34.479.835.000,00	34.564.010.000,00	84.175.000,00	0,24	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.429.339.000,00	28.508.214.000,00	78.875.000,00	0,28	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	579.266.000,00	584.566.000,00	5.300.000,00	0,91	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.354.400.000,00	5.354.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pelayanan Kesehatan	116.830.000,00	116.830.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.021.783.000,00	3.019.083.000,00	(2.700.000,00)	(0,09)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	869.100.000,00	869.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.096.683.000,00	2.093.983.000,00	(2.700.000,00)	(0,13)	
5.2.1.02.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	3.429.956.000,00	3.429.956.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.894.503.000,00	2.894.503.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	535.453.000,00	535.453.000,00	0,00	0,00		
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	11.381.003.000,00	11.381.003.000,00	0,00	0,00		
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	11.009.200.000,00	11.009.200.000,00	0,00	0,00		
5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	371.803.000,00	371.803.000,00	0,00	0,00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.224.291.000,00	300.795.565.000,00	571.274.000,00	0,19		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.827.428.000,00	9.858.520.000,00	31.092.000,00	0,32		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.335.213.000,00	6.353.455.000,00	18.242.000,00	0,29		
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	616.404.000,00	617.754.000,00	1.350.000,00	0,22		
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	202.943.000,00	202.943.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	772.342.000,00	772.342.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.655.740.000,00	1.667.240.000,00	11.500.000,00	0,69		
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	58.724.000,00	58.724.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	126.531.000,00	126.531.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	3.828.000,00	3.828.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	55.703.000,00	55.703.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.728.763.000,00	15.980.353.000,00	251.590.000,00	1,60		
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.109.496.000,00	9.332.321.000,00	222.825.000,00	2,45		
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	740.818.000,00	740.818.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.603.073.000,00	2.603.073.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	909.942.000,00	909.942.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	582.789.000,00	582.789.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.723.494.000,00	1.752.259.000,00	28.765.000,00	1,67		
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	54.751.000,00	54.751.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.732.965.000,00	55.821.765.000,00	88.800.000,00	0,16		
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	556.150.000,00	556.150.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.185.460.000,00	1.185.460.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.424.449.000,00	9.424.449.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemegang Lelang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	337.636.000,00	337.636.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Sateit	1.554.474.000,00	1.554.474.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	31.414.000,00	31.414.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	459.007.000,00	459.007.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.517.579.000,00	10.543.079.000,00	25.500.000,00	0,24		
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.949.354.000,00	6.944.604.000,00	(4.750.000,00)	(0,07)		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.893.798.000,00	1.905.398.000,00	11.600.000,00	0,61		
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.758.867.000,00	7.758.617.000,00	(250.000,00)	0,00		
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	158.890.000,00	158.890.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Trophy/Bendera/Cinderamata	752.342.000,00	752.342.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.21	Belanja Penserfikatan Tanah	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	403.560.000,00	403.560.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	818.685.000,00	828.335.000,00	9.650.000,00	1,18		
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	663.173.000,00	662.983.000,00	(190.000,00)	(0,03)		
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.552.380.000,00	1.586.450.000,00	34.070.000,00	2,19		
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan Iklan dan Radio Spot	1.043.100.000,00	1.043.100.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.177.516.000,00	4.190.686.000,00	13.170.000,00	0,32		
5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	211.475.000,00	211.475.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran Perkara	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.42	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	3.731.400.000,00	3.731.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	203.050.000,00	203.050.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	562.266.000,00	562.266.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.359.994.000,00	8.359.994.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.132.166.000,00	1.132.166.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin	371.000.000,00	371.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	6.852.413.000,00	6.852.265.000,00	(148.000,00)	0,00		
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	4.415.000,00	4.563.000,00	148.000,00	3,35		
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.666.818.000,00	9.659.668.000,00	(7.150.000,00)	(0,07)		
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	916.242.000,00	909.092.000,00	(7.150.000,00)	(0,78)		
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.989.025.000,00	1.989.025.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.900.046.000,00	5.900.046.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	504.073.000,00	504.073.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		7
5.2.2.05.09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	307.572.000,00	307.572.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.671.429.000,00	7.718.572.000,00	47.143.000,00	0,61		
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.793.941.000,00	3.822.785.000,00	28.844.000,00	0,76		
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.354.409.000,00	3.370.284.000,00	15.875.000,00	0,47		
5.2.2.06.03	Belanja Pengjilidan	519.623.000,00	522.047.000,00	2.424.000,00	0,47		
5.2.2.06.04	Belanja Laminating	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.406.407.000,00	1.437.407.000,00	31.000.000,00	2,20		
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.194.107.000,00	1.225.107.000,00	31.000.000,00	2,60		
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	212.300.000,00	212.300.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.088.858.000,00	1.088.858.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.088.858.000,00	1.088.858.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.795.996.000,00	2.795.996.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	376.212.000,00	376.212.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	116.150.000,00	116.150.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	175.060.000,00	175.060.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	596.525.000,00	596.525.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	640.430.000,00	640.430.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	633.150.000,00	633.150.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	68.674.000,00	68.674.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	144.765.000,00	144.765.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.759.405.000,00	18.862.985.000,00	103.580.000,00	0,55		
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.053.923.000,00	1.053.923.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.479.592.000,00	13.505.812.000,00	26.220.000,00	0,19		
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.479.457.000,00	3.495.457.000,00	16.000.000,00	0,46		
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan minuman pelatihan	439.803.000,00	439.803.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	267.497.000,00	267.497.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	39.133.000,00	100.493.000,00	61.360.000,00	156,80		
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	607.290.000,00	607.290.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	95.240.000,00	95.240.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	118.364.000,00	118.364.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	138.246.000,00	138.246.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5. 2. 2. 12. 08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 13	Belanja Pakaian Kerja	383.909.000,00	383.909.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 13. 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	357.454.000,00	357.454.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 13. 02	Belanja Pakaian Kerja PMK	26.455.000,00	26.455.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.081.871.000,00	1.081.871.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 14. 01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 14. 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 14. 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	126.625.000,00	126.625.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 14. 04	Belanja Pakaian Olahraga	946.946.000,00	946.946.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.556.433.000,00	31.570.368.000,00	13.935.000,00	0,04		
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.305.183.000,00	31.319.118.000,00	13.935.000,00	0,04		
5. 2. 2. 15. 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	251.250.000,00	251.250.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 16. 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 16. 10	Belanja Bantuan Penyerangan Calon Siswa STPDN, IIP, Program Magister	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.127.593.000,00	1.127.593.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 17. 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	877.593.000,00	877.593.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 17. 02	Belanja Sosialisasi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 17. 03	Belanja Bimbingan Teknis	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20	Belanja Pemeliharaan	15.350.410.000,00	15.356.634.000,00	6.224.000,00	0,04		
5. 2. 2. 20. 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.140.476.000,00	2.140.476.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20. 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	46.080.000,00	46.080.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20. 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	251.500.000,00	251.500.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20. 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.503.504.000,00	2.512.404.000,00	8.900.000,00	0,36		
5. 2. 2. 20. 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.326.134.000,00	4.326.134.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20. 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	187.155.000,00	187.155.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20. 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.439.103.000,00	2.436.427.000,00	(2.676.000,00)	(0,11)		
5. 2. 2. 20. 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.612.651.000,00	2.612.651.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20. 09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	111.250.000,00	111.250.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 20. 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	732.557.000,00	732.557.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.888.438.000,00	4.888.438.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 21. 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.909.250.000,00	1.909.250.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 21. 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.724.998.000,00	2.724.998.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 2. 21. 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	254.190.000,00	254.190.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		7
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	101.131.586.000,00	101.131.586.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	96.120.332.000,00	96.120.332.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	5.011.254.000,00	5.011.254.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.636.018.000,00	1.636.018.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.636.018.000,00	1.636.018.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.223.899.000,00	6.238.599.000,00	14.700.000,00	0,24		
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.223.899.000,00	6.238.599.000,00	14.700.000,00	0,24		
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.548.768.000,00	2.561.343.000,00	12.575.000,00	0,49		
5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	1.797.658.000,00	1.819.008.000,00	21.350.000,00	1,19		
5.2.2.34.02	Belanja Peralatan Sekolah	32.549.000,00	32.549.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Juran	718.561.000,00	709.786.000,00	(8.775.000,00)	(1,22)		
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.010.753.000,00	988.538.000,00	(22.215.000,00)	(2,20)		
5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	1.009.532.000,00	987.317.000,00	(22.215.000,00)	(2,20)		
5.2.3	Belanja Modal	207.504.567.000,00	214.801.325.000,00	7.296.758.000,00	3,52		
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	13.506.000.000,00	13.506.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	13.506.000.000,00	13.506.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	784.923.000,00	784.923.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	760.298.000,00	760.298.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.263.677.000,00	1.263.677.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.260.677.000,00	1.260.677.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.259.583.000,00	3.259.583.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Darat Bermotor Perorangan	2.220.950.000,00	2.220.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	186.826.000,00	186.826.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	252.300.000,00	252.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	363.735.000,00	363.735.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.299.000,00	37.299.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	198.473.000,00	198.473.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	56.450.000,00	56.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	56.450.000,00	56.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.22.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perakkas Pengangkat Bermesin	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	201.296.000,00	201.296.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Biora	201.296.000,00	201.296.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	188.669.000,00	188.669.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	39.873.000,00	39.873.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proccsing	148.796.000,00	148.796.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.3.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	655.600.000,00	655.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	629.600.000,00	629.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.034.103.000,00	1.034.103.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	87.734.000,00	87.734.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	936.369.000,00	936.369.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.690.196.000,00	1.690.196.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.047.887.000,00	1.047.887.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	246.971.000,00	246.971.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	17.530.000,00	17.530.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	362.183.000,00	362.183.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.737.105.000,00	6.737.105.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unt Jaringan	3.700.350.000,00	3.700.350.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	585.180.000,00	585.180.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	55.494.000,00	55.494.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	310.272.000,00	310.272.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.085.809.000,00	2.085.809.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	172.725.000,00	172.725.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	55.225.000,00	55.225.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	27.480.000,00	27.480.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		7
5. 2. 3. 30. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	75.520.000,00	75.520.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 30. 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	84.025.000,00	84.025.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 31. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	49.825.000,00	49.825.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 31. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 32. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	20.430.184.000,00	20.430.184.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.933.743.000,00	2.933.743.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	338.248.000,00	338.248.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	2.022.231.000,00	2.022.231.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Kedokteran Bedah	5.840.460.000,00	5.840.460.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	72.501.000,00	72.501.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	4.815.703.000,00	4.815.703.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.464.106.000,00	1.464.106.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	2.918.898.000,00	2.918.898.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 34. 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	11.754.000,00	11.754.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.784.222.000,00	4.784.222.000,00	0,00	0,00		
5. 2. 3. 35. 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Sterilisasi	4.784.222.000,00	4.784.222.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		7
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.327.506.000,00	2.327.506.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	186.809.000,00	186.809.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	58.191.000,00	58.191.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	45.248.000,00	45.248.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.36.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	189.267.000,00	189.267.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.36.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	1.846.614.000,00	1.846.614.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	57.221.000,00	57.221.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.41.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	57.221.000,00	57.221.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	104.054.000,00	104.054.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	104.054.000,00	104.054.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.022.270.000,00	47.380.097.000,00	3.357.827.000,00	7,63		
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	15.429.654.000,00	15.429.654.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	762.400.000,00	1.292.213.000,00	529.813.000,00	69,49		
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.639.505.000,00	5.639.505.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	896.450.000,00	896.450.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	14.932.050.000,00	18.080.064.000,00	3.148.014.000,00	21,08		
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.128.473.000,00	2.128.473.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	256.344.000,00	256.344.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	267.214.000,00	267.214.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	3.091.050.000,00	2.771.050.000,00	(320.000.000,00)	(10,35)		
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	476.380.000,00	476.380.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.477.200.000,00	7.477.200.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.477.200.000,00	7.477.200.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	131.350.000,00	131.350.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	131.350.000,00	131.350.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	25.750.000,00	839.035.000,00	813.285.000,00	3.158,39		
5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	25.750.000,00	839.035.000,00	813.285.000,00	3.158,39		
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	3.250.201.000,00	4.753.741.000,00	1.503.540.000,00	46,26		
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.717.396.000,00	3.220.936.000,00	1.503.540.000,00	87,55		
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.532.805.000,00	1.532.805.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.392.864.000,00	27.392.864.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	22.982.210.000,00	22.982.210.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	4.335.654.000,00	4.335.654.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.144.005.000,00	1.144.005.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	573.435.000,00	573.435.000,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	570.570.000,00	570.570.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.3.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	19.331.000,00	19.331.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	19.331.000,00	19.331.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.290.200.000,00	1.290.200.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.290.200.000,00	1.290.200.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.685.375.000,00	13.305.345.000,00	1.619.970.000,00	13,86		
5.2.3.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	11.667.550.000,00	13.287.520.000,00	1.619.970.000,00	13,88		
5.2.3.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	489.523.000,00	489.523.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	489.523.000,00	489.523.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.051.033.000,00	1.051.033.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	899.874.000,00	899.874.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	4.636.000,00	4.636.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	14.156.000,00	14.156.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	26.813.000,00	26.813.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	37.706.000,00	37.706.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	4.636.000,00	4.636.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	14.636.000,00	14.636.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	12.636.000,00	12.636.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.83.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	12.636.000,00	12.636.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	7.273.762.000,00	7.273.762.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	7.273.762.000,00	7.273.762.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	43.863.975.000,00	43.863.975.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	21.987.994.000,00	21.987.994.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	21.875.981.000,00	21.875.981.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	272.503.000,00	274.639.000,00	2.136.000,00	0,78	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	272.503.000,00	274.639.000,00	2.136.000,00	0,78	
SURPLUS / (DEFISIT)		(29.632.343.000,00)	(29.632.343.000,00)	0,00	0,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.800.000.000,00	42.800.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.7.01	Dana Bergulir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyeritaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
6.1.7.01.01	Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.8.01	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.8.01.01	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyeritaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		13.167.657.000,00	13.167.657.000,00	0,00	0,00	
6.2	Penyeritaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.167.657.000,00	13.167.657.000,00	0,00	0,00	
6.2.2	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.167.657.000,00	13.167.657.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Penyeritaan Modal pada BKK Kota Magelang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyeritaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
6.2.2.02.01	Penyeritaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.975.000.000,00	3.975.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.02	Penyeritaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan	665.000.000,00	665.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.03	Penyeritaan Modal pada PD BPR Bank Magelang	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.04	Penyeritaan Modal pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyeritaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
6.2.2.02.05	Penyeritaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	4.527.657.000,00	4.527.657.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.07	Penyeritaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	4.527.657.000,00	4.527.657.000,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO		29.632.343.000,00	29.632.343.000,00	0,00	0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	7
		3	4	5 = 4 - 3	6		
1	2						

MAGELANG, 2017
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

